

PERAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN TERTIB SOSIAL

1. Penyimpangan Sosial

A. Setiap individu dalam masyarakat diajarkan nilai dan aturan yang membentuk konformitas, yaitu perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial. John M. Shepard mendefinisikan konformitas sebagai bentuk interaksi di mana seseorang berperilaku sesuai dengan harapan masyarakatnya. Sebaliknya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma disebut perilaku menyimpang atau nonkonformis.

Menurut sosiolog, penyimpangan tidak melekat pada perilaku tertentu, tetapi ditentukan oleh definisi sosial. Contohnya, mengenakan pakaian renang di sekolah dianggap menyimpang, tetapi tidak di pantai. Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa penyimpangan muncul dari interaksi dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Proses belajar dari lingkungan ini dapat membuat seseorang mempelajari perilaku menyimpang, yang dikenal sebagai Teori Asosiasi Diferensial. Contohnya, seorang siswa yang terlibat tawuran karena bergaul dengan siswa lain yang sering berkelahi.

B. Jenis penyimpangan menurut Edwin M. Lemert

- **Penyimpangan Primer**, yang masih dapat diterima masyarakat, seperti terlambat masuk sekolah karena ban bocor.
- **Penyimpangan Sekunder**, yang tidak dapat ditoleransi karena dilakukan berulang kali, seperti mabuk-mabukan atau penyalahgunaan narkoba. Pandangan ini dikenal sebagai Teori Pelabelan.

Namun, penyimpangan sosial tidak selalu bersifat negatif. Ada dua jenis penyimpangan, di antaranya:

- **Penyimpangan positif**: berdampak baik bagi masyarakat, seperti inovasi dan kreativitas. Contohnya adalah emansipasi perempuan yang membuka peluang bagi wanita bekerja, mendukung keluarga secara ekonomi.
- **Penyimpangan negatif**: merugikan masyarakat, seperti tindakan kriminal atau penggunaan obat terlarang

2. Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial adalah mekanisme yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat yang dinamis. Individu saling berinteraksi, menghasilkan perubahan sosial yang bisa berdampak pada tatanan yang ada. Untuk mengatasi penyimpangan dan mengembalikan keseimbangan sosial, masyarakat berupaya mencegah atau mengurangi penyimpangan dengan mengarahkan anggota untuk mengikuti norma dan nilai yang telah ada. Sedangkan menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah cara masyarakat menertibkan perilaku anggotanya. Roucek menambahkan bahwa ini mencakup proses mendorong atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Ada dua sifat pengendalian sosial: preventif, yang dilakukan sebelum pelanggaran (misalnya, nasihat orang tua), dan represif, yang dilakukan setelah pelanggaran (seperti mediasi guru setelah tawuran). Metode pengendalian sosial meliputi cara lisan dan simbolik (persuasif) serta cara kekerasan (koersif), masing-masing bertujuan untuk mengajak atau memaksa individu mengikuti aturan yang ada.

Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui cara-cara:

- 1. Kekuatan Fisik:** Digunakan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan tata tertib, misalnya penyitaan barang dagang oleh aparat.
- 2. Imbalan dan Hukuman:** Imbalan bersifat preventif untuk mendorong perilaku sesuai norma, seperti penghargaan bagi siswa berprestasi. Sebaliknya, hukuman bersifat represif untuk memulihkan keadaan, contohnya skorsing bagi siswa yang bolos.
- 3. Sosialisasi:** Proses internalisasi norma dan nilai agar individu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- 4. Tekanan Sosial:** Individu cenderung mengikuti norma kelompok untuk diterima, sesuai pandangan Richard Lapiere.
- 5. Pengendalian Formal dan Informal:** Pengendalian formal dilakukan oleh lembaga resmi dengan peraturan, sementara informal bersifat lebih personal dan tidak terstruktur.

Pengendalian sosial dibagi menjadi beberapa jenis:

- 1. Pengendalian Formal:** Dilakukan oleh lembaga resmi seperti perusahaan, dengan aturan tertulis mengenai gaji, cuti, dan sanksi pelanggaran.
- 2. Pengendalian Informal:** Dilakukan oleh kelompok kecil, tanpa aturan tertulis, seperti norma dalam keluarga atau kelompok bermain.
- 3. Pengendalian Melalui Institusi dan Noninstitusi:** Melalui lembaga sosial seperti pendidikan atau hukum, contohnya hukuman bagi pelanggar hukum, serta melalui individu atau kelompok masyarakat, misalnya mediasi konflik.

3. Keteraturan Sosial

Keteraturan sosial terjadi saat individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai peran, nilai, dan norma yang berlaku. Masyarakat yang tertib tercipta ketika kewajiban dipenuhi, dan hak diterima. Jika tidak, bisa timbul konflik sosial.

Keteraturan ini harus diupayakan oleh setiap individu. Meskipun dinamis, keteraturan terdiri dari empat tahap:

- 1. Tertib Sosial:** Individu bertindak sesuai peran dan haknya.
- 2. Order:** Norma dan nilai sosial diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 3. Keajegan:** Keteraturan yang konsisten berkat penerapan nilai dan norma yang berkelanjutan.
- 4. Pola:** Hubungan sosial tetap yang menjadi model bagi masyarakat, seperti musyawarah di desa

4. Peran Lembaga Sosial dalam Ketertiban Sosial

Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, lembaga lembaga yang berperan dalam menjaga ketertiban sosial, antara lain sebagai berikut :

- 1. Polisi:** Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah perilaku menyimpang, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain penegakan hukum, polisi juga berperan dalam pembinaan.
- 2. Pengadilan:** Berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum. Hukuman dapat berupa denda, kurungan, atau penjara, tergantung pada kesalahan yang dilakukan.
- 3. Adat:** Sebagai pranata sosial dalam masyarakat tradisional, adat mengatur tata tertib dan perilaku. Pelanggaran terhadap hukum adat dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat, seperti pengucilan.
- 4. Tokoh Masyarakat:** Individu berpengaruh yang dihormati dan disegani. Mereka diharapkan memberikan keteladanan, bimbingan, dan penyelesaian konflik. Terdapat tokoh masyarakat formal (diangkat oleh negara) dan informal (dihormati oleh masyarakat).
- 5. Media Massa:** Berperan sebagai kontrol sosial yang efektif melalui pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik. Media massa membantu dalam penanganan masalah sosial secara objektif dan terbuka.

